

Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan pada Badan Usaha Milik Desa

Prayudi Nugroho, Edy Riyanto, Vissia Dewi Haptari

Politeknik Keuangan Negara STAN, Sektor V, Jl. Bintaro Utama 5, Jurang Manggu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten 15222, Indonesia

ARTICLE INFO

Keywords:
BUMDESA,
Financial Accounting,
BUMDESA Financial Accounting
Application,
Financial Accounting Standards
for Entities Without Public
Accountability (SAK ETAP)

Kata kunci:
BUMDESA,
Akuntansi Keuangan,
Aplikasi Akuntansi Keuangan
BUMDESA,
Standar Akuntansi Keuangan
Entitas Tanpa Akuntabilitas
Publik (SAK ETAP)

Corresponding author:
nugrohopradyudi25@gmail.com

ABSTRACT

Village-Owned Enterprises (BUMDESA) were established to manage village assets and other potential village-owned resources, in order to improve the welfare of village communities. BUMDESA's activities are currently growing rapidly, but on the other hand there are problems in recording and reporting BUMDESA's financial transactions according to Financial Accounting Standards (SAK). Studies on several BUMDESA in Mojokerto Regency, East Java Province, show that this problem occurs because of the limited accounting competence of BUMDESA personnel. Efforts to increase the capacity of BUMDESA's human resources (HR) are carried out through several activities such as socialization, visitation, mentoring, consulting, and accounting training as well as the introduction of BUMDESA financial accounting applications. The ultimate goal of this activity is that BUMDESA's human resources are able to understand accounting, and are able to independently apply the accounting process to BUMDESA's financial transactions in order to produce BUMDESA's financial reports in accordance with the Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP).

SARI PATI

Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) didirikan untuk mengelola aset desa dan potensi sumber daya lain milik desa, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Aktivitas BUMDESA saat ini telah berkembang pesat, namun di sisi lain terdapat permasalahan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan BUMDESA sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Studi pada beberapa BUMDESA di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, menunjukkan bahwa masalah ini terjadi karena keterbatasan kompetensi akuntansi pada personel BUMDESA. Upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) BUMDESA dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti sosialisasi, visitasi, pendampingan, konsultasi, dan pelatihan akuntansi serta pengenalan aplikasi akuntansi keuangan BUMDESA. Tujuan akhir kegiatan ini adalah agar SDM BUMDESA mampu memahami akuntansi, dan secara mandiri mampu menerapkan proses akuntansi atas transaksi keuangan BUMDESA guna menghasilkan laporan keuangan BUMDESA sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

© 2023 JP MI, All rights reserved.

PENDAHULUAN

Latar belakang

Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) adalah salah satu program pemerintah guna pem-berdayaan ekonomi masyarakat desa dan pem-bangunan desa, melalui optimalisasi bisnis di desa. Meski jumlah BUMDESA di berbagai provinsi & kabupaten di Indonesia telah berkembang pesat dengan beragam jenis usaha, tapi masih ada problem dalam pencatatan transaksi keuangan. Hal ini terjadi antara lain karena keterbatasan kompetensi personel/sumber daya manusia (SDM) di bidang akuntansi. Kondisi ini menyebabkan banyak-nya BUMDESA, yang sebenarnya sudah lama berdiri, ternyata hingga saat ini belum mampu menjalankan kegiatannya sesuai harapan (unit usaha belum berjalan, atau BUMDESA bahkan sekedar nama. Hasil penelitian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2018 menyebutkan bahwa 1034 BUMDESA tidak menyampaikan laporan keuangan, 864 BUMDESA belum tertib dalam penatausahaan dan pelaporan BUMDESA, serta 585 BUMDESA belum didukung oleh pengelola yang kompeten (PKN STAN, 2022).

Khusus di Jawa Timur, yang memiliki kabupaten/ kota terbanyak di Indonesia, sebanyak 80% desa di Jawa Timur sudah memiliki BUMDESA. Namun, berdasarkan data per 31 Desember 2021, dari 6363 desa di Jawa Timur, ternyata hanya 1028 desa (16,16%) yang telah memiliki BUMDESA berklasifikasi lanjutan (maju), sehingga sebagian besar BUMDESA masih berstatus menengah (berkembang) dan pemula (rintisan). Dari 9578 unit usaha BUMDESA, usaha terbanyak adalah jasa keuangan, yang dijalankan oleh 4058 BUMDESA. Dari indikator kemajuan BUMDESA, yang mencakup aspek legalitas, kelembagaan, administrasi keuangan, permodalan, unit usaha, pendapatan kotor,

keuntungan, kontribusi ke Penda-patan Asli Desa (PADesa), penyerapan tenaga kerja, serta kemitraan / kerja sama, salah satu kelemahan BUMDESA berstatus berkembang dan pemula ada-lah administrasi keuangan (skor 0,15 kategori lemah pada BUMDESA berstatus berkembang, dan skor 0,08 kategori lemah pada BUMDESA berstatus pemula) (Lianto, 2022, dalam PKN STAN, 2022; Binawati, 2022). Guna mengatasi kelemahan di atas, tim dosen PKN STAN ditugaskan untuk melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (pengmas) dengan mitra kegiatan berupa BUMDESA di Jawa Timur, salah satunya di Kabupaten Mojokerto, yang memiliki 276 BUMDESA (Binawati, 2022).

Rumusan masalah

Rumusan masalah yang ingin diatasi dalam pengmas adalah bagaimana cara meningkatkan kompetensi SDM BUMDESA di bidang akuntansi dan selanjutnya diharapkan secara mandiri mampu mencatat transaksi keuangan BUMDESA hingga tersusun laporan keuangan BUMDESA sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah terciptanya peningkatan kualitas SDM BUMDESA di bidang akuntansi dasar dengan harapan nantinya dapat bisa melakukan pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan BUMDESA sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Metodologi

Upaya peningkatan kapasitas di bidang akuntansi pada SDM BUMDESA kabupaten Mojokerto dilakukan dengan skema pendampingan, baik itu dilakukan secara langsung dalam bentuk pelatihan dan pendampingan luring maupun daring dan

terbagi dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

1. Pengmas tahap I (Mei 2022) dilakukan secara tatap muka langsung (*offline*) berupa pelatihan singkat pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), disertai dengan sosialisasi aplikasi akuntansi keuangan BUMDESA sebagai pendukung kedua proses di atas. Selain itu dilakukan visitasi (kunjungan) ke BUMDESA guna mengetahui proses pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan BUMDESA (sebagai sampel).
2. Pengmas tahap II (Juni – Agustus 2022) dilakukan dalam bentuk pendampingan dan konsultasi (diskusi) secara *on line* antara tim pengmas (dosen) PKN STAN dengan BUMDESA selama lebih kurang 3 bulan (melalui aplikasi *zoom* dan *Whatapps group*)

Seluruh kegiatan dilakukan di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto dan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) PKN STAN.

Melalui 2 tahap kegiatan ini diharapkan tercipta peningkatan kompetensi SDM BUMDESA dalam mencatat transaksi keuangan BUMDESA serta menyusun, menyajikan, dan menyampaikan laporan keuangan BUMDESA secara mandiri kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) BUMDESA, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Lebih lanjut, hasil kegiatan ini diharapkan bermanfaat bagi perbaikan administrasi keuangan desa, kabupaten, provinsi, hingga negara. Sebaliknya, melalui 2

tahap kegiatan ini tim pengmas (dosen) PKN STAN diharapkan bisa mendapat gambaran lebih banyak atas masalah riil BUMDESA sebagai acuan guna memberikan solusi yang lebih aplikatif atas masalah mitra.

Tinjauan Pustaka

BUMDESA merupakan badan usaha berbadan hukum yang didirikan di desa oleh desa / beberapa desa (dua atau lebih) berdasarkan Peraturan Desa / Peraturan Bersama Antar Desa, dan disepakati disepakati masyarakat desa melalui Musyawarah Desa. BUMDESA didirikan dengan tujuan untuk mengelola usaha (bisnis) desa, memanfaatkan aset desa, mengembangkan investasi dan produktivitas aset desa, menyediakan jasa pelayanan umum secara mandiri, dan/atau menyediakan jenis usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan desa dari hasil pendayagunaan sumber daya desa. Pengelolaan (manajemen) BUMDESA didasarkan pada semangat kekeluargaan dan gotong royong, profesional, terbuka dan bertanggung jawab, partisipatif, memprioritaskan sumber daya lokal, dan berkelanjutan (PP 11/2021; Permendagri 1/2016; Permendesa PDPT 4/2015).

Seluruh/sebagian besar modal BUMDESA dimiliki desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan. Modal awal BUMDESA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang mencakup (1) penyertaan modal desa atau (2) penyertaan modal desa ditambah penyertaan modal masyarakat desa, dalam bentuk uang dan/atau barang selain tanah dan bangunan. Untuk selanjutnya, modal BUMDESA mencakup (1) penyertaan modal desa, (2) penyertaan modal masyarakat desa, dan (3) bagian dari laba usaha yang ditetapkan

dalam Musyawarah Desa untuk penambahan modal (Permendagri 1/2016; Permendesa PDDT 4/2015).

Aset BUMDESA berasal dari penyertaan modal, bantuan tidak mengikat termasuk hibah, hasil usaha, pinjaman, dan/atau sumber lain yang sah. Aset BUMDESA berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang, berwujud maupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan bisa memberikan manfaat/hasil bagi BUMDESA. Aset BUMDesa dikelola sesuai kaidah bisnis yang sehat, dan perkembangan serta keberadaannya dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan BUMDESA. Jika BUMDesa mengelola, menyewa, meminjam, dan mengambil manfaat aset desa, maka aset desa tidak dapat dijadikan jaminan, ganti rugi, pemenuhari kewajiban, atau prestasi lain yang menjadi tanggung jawab hukum dari unit usaha BUMDESA (PP 11/2021 dan Permendesa PDDT 4/2015)

Hasil usaha BUMDESA merupakan pendapatan BUMDESA dari hasil usaha dikurangi pengeluaran biaya (beban) dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas inventaris (aset tetap) BUMDESA dalam 1 tahun buku / 1 tahun anggaran / 1 tahun kalender. Pembagian hasil usaha BUMDESA ditetapkan berdasarkan AD/ART BUMDESA. Pembagian hasil usaha BUMDESA kepada desa merupakan pendapatan desa, yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Desa, antara lain untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDesa. Alokasi pembagian hasil usaha dapat dibantu dengan penerapan akuntansi.

Guna mendukung perkembangan dan kemajuan usaha BUMDESA, Pemerintah Pusat dan Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan perpajakan serta retribusi bagi BUMDESA. Sementara itu, kerugian BUMDESA menjadi beban BUMDESA. Jika BUMDESA tidak bisa menutup kerugian dengan asetnya, maka Musyawarah Desa menyatakan bahwa BUMDESA merugi, dan unit usaha milik BUMDESA yang juga tidak bisa menutup kerugian dengan aset juga dinyatakan pailit sesuai aturan kepailitan (PP 11/2021 dan Permendesa PDDT 4/2015),

Terkait pelaporan keuangan BUMDESA, pelaksana operasional BUMDESA wajib menyiapkan laporan pertanggungjawaban kegiatan BUMDESA secara berkala (semesteran & tahunan), yang disampaikan kepada Penasihat (yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa).

1. Laporan semesteran minimal memuat:
 - a. laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran beserta penjelasannya; dan
 - b. rincian masalah selama 1 semester yang mempengaruhi kegiatan BUMDESA.
2. Laporan tahunan (yang disampaikan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah penasihat dan pengawas BUMDESA), minimal memuat:
 - a. perhitungan tahunan berupa laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan beserta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari unit usaha BUMDESA;
 - c. laporan mengenai keadaan dan

- jalannya BUMDESA beserta hasil yang telah dicapai;
- d. kegiatan utama BUMDESA dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan BUMDESA; dan
 - f. laporan tentang tugas pengurusan pelak-sana operasional, pengawasan oleh peng-awas, dan pemberian nasihat oleh penasi-hat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.

Selain laporan berkala, pelaksana operasional BUMDESA sewaktu-waktu dapat memberi laporan khusus pada pengawas dan/ atau Musyawarah Desa (PP 11/2021 dan Permendesa PD TT 4/2015),

Musyawarah Desa akan memutuskan penerimaan laporan tahunan BUMDESA dan penggunaan hasil usaha BUMDESA yang menjadi bagian desa. Hasil Musyawarah Desa kemudian dipublikasikan melalui media massa dan alat penyebaran informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Penerimaan laporan tahunan BUMDESA oleh Musyawarah Desa membebaskan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya dalam tahun buku yang berakhir, kecuali terkait perbuatan pidana. Laporan keuangan BUMDESA selanjutnya diaudit oleh pengawas, atau ditunjuk dan dimintakan bantuan kepada auditor independen. Jika terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDESA, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa (PP 11/2021 dan Permendesa PD TT 4/2015),

Akuntansi sangat berperan bagi BUMDESA. Hal ini karena laporan keuangan BUMDESA

dihasilkan dari proses akuntansi, dan opini auditor atas laporan keuangan BUMDESA antara lain didasarkan pada apakah laporan keuangan itu sudah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi merupakan proses identifikasi, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan (Weygandt, Kimmel, and Kieso, 2018). Hasil utama dari kegiatan akuntansi adalah laporan keuangan, yang tata cara penyusunan dan penyajiannya diatur dalam SAK. Audit atas laporan keuangan berguna untuk menen-tukan kewajaran atas laporan keuangan yang telah disajikan manajemen entitas, termasuk BUMDESA. Melalui akuntansi, dapat pula dibuat laporan lain (sebagai pendukung) yang bersifat internal (khusus untuk kepentingan manajemen). Melalui informasi yang tersaji pada laporan keuangan BUMDESA (yang disusun sesuai SAK dan didukung dengan opini auditor) maupun laporan internal (pendukung)-nya, diharapkan seluruh pengguna laporan keuangan yang berkepentingan (*stakeholder*), baik pihak eksternal BUMDESA (investor/calon investor, kreditor/ calon kreditor, pemerintah, analis keuangan, dan lain-lain), maupun pihak internal (manajemen) BUMDESA dapat mengambil keputusan ekonomis yang tepat terkait kepentingannya terhadap aktivitas BUMDESA (investasi, kredit, pajak, dan sebagainya) demi kelangsungan hidup entitas BUMDESA.

Khusus terkait penyajian laporan keuangan (informasi akuntansi), Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan yang ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan bahwa informasi keuangan akan berguna bagi para *stakeholder* jika memiliki karakteristik sebagai berikut.

1. Karakteristik kualitatif fundamental (*fundamental qualities*):

a. Informasi keuangan dianggap relevan (*relevance*) jika informasi tersebut mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh penggunanya, sehingga harus mengandung unsur:

1. nilai prediktif (*predictive value*), yang bisa dipakai sebagai input untuk memprediksi *outcome* (hasil) di masa depan;
2. nilai konfirmatori (*confirmatory value*), karena mampu menyediakan umpan balik (*feedback*) untuk mengonfirmasi / mengubah evaluasi sebelumnya;
3. materialitas (*materiality*), karena penghilangan, salah saji, atau pengaburan informasi (baik karena sifatnya atau besaran nilainya) diperkirakan cukup mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

b. Informasi keuangan dianggap memiliki ketepatan representasi (*faithful representation*) ketika mampu merepresentasikan fenomena yang relevan beserta substansi fenomena, sehingga mengandung unsur:

1. tersaji lengkap (*completeness*), karena telah mencakup seluruh informasi yang diperlukan pengguna untuk memahami fenomena yang digambarkan dalam laporan keuangan, termasuk seluruh deskripsi dan penjelasan yang perlu;
2. netral (*neutrality*), karena disajikan secara hati-hati (*prudence*) dan tanpa bias dalam pemilihan

atau penyajian informasi keuangan, tidak diarahkan, dibobotkan, ditekankan, dibatalkan penekanannya, atau dimanipulasi untuk meningkatkan kemungkinan bahwa informasi keuangan akan diterima lebih baik atau tidak baik oleh pengguna;

3. terbebas dari kesalahan maupun ketidakakuratan (*free from error*), karena tidak ada kesalahan (*error*) angka yang material dalam informasi keuangan, dan jika informasi angka itu bersifat estimasi maka angka estimasi itu masuk akal, serta dideskripsikan secara jelas tentang sifat, keterbatasan, serta cara penyusunan atau penempatannya).

2. Karakteristik kualitatif peningkat (*enhancing qualities*);

a. Informasi keuangan memiliki sifat keterbandingan (*comparability*) jika memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan dan perbedaan antar pos (minimal 2 pos) dalam laporan keuangan, sehingga perlu ada konsistensi penggunaan metode yang sama terhadap pos-pos yang sama, baik dari periode ke periode dalam satu entitas penyusun laporan atau dalam satu periode antar entitas penyusun laporan.

Agar informasi dapat dibandingkan, informasi tidak harus disajikan seragam, karena yang penting adalah bahwa hal yang serupa harus terlihat serupa dan hal yang berbeda harus terlihat berbeda

karena keterbandingan informasi keuangan tidak akan meningkat dengan membuat pos-pos berbeda terlihat serupa dan keterbandingan informasi keuangan juga tidak dapat meningkat karena membuat pos-pos serupa menjadi terlihat berbeda;

- b. Informasi keuangan dianggap terverifikasi (*verifiability*) jika berbagai pengobservasi independen dengan beragam pengetahuan dapat mencapai konsensus (meski bukan representasi tepat) bahwa penggambaran tertentu atas informasi merupakan representasi tepat atas informasi yang bersangkutan;
- c. Informasi keuangan bisa terpahami (*under-standability*) jika terdapat pengklasifikasian, pengkarakteristikan, dan penyajian informasi secara jelas dan ringkas;
- d. Informasi keuangan mengandung unsur ketepatanwaktuan (*timeliness*) jika informasi itu tersedia bagi pembuat keputusan pada saat yang tepat sehingga memiliki pengaruh pada putusan mereka.

(IAI, 2020)

Terkait akuntansi keuangan bagi entitas seperti BUMDESA, sesuai skala dan kondisi usaha, BUMDESA dapat menggunakan Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) atau Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK EMKM mensyaratkan bahwa laporan keuangan entitas mencakup Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Laba Rugi, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sementara itu, SAK ETAP mensyaratkan bahwa laporan keuangan entitas mencakup Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan

Lab Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1. Laporan Laba Rugi berisi informasi tentang pendapatan, beban, dan laba/rugi BUMDESA selama periode tertentu (umumnya 1 tahun);
2. Laporan Perubahan Ekuitas berisi informasi tentang perubahan ekuitas (modal) BUMDESA selama periode tertentu (umumnya 1 tahun);
3. Neraca (Laporan Posisi Keuangan) berisi informasi tentang aset, kewajiban (utang), dan ekuitas (modal) BUMDESA pada tanggal tertentu (umumnya akhir tahun);
4. Laporan Arus Kas (LAK) berisi informasi tentang arus keluar masuk kas BUMDESA selama periode tertentu (umumnya 1 tahun), yang terbagi atas aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan (pendanaan);
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berisi informasi tentang penjelasan atas angka-angka pada laporan keuangan BUMDESA, maupun penjelasan lain tentang aktivitas BUMDESA yang terkait dengan laporan keuangan BUMDESA.

Penerapan akuntansi dalam pencatatan transaksi keuangan hingga pelaporan keuangan BUMDESA pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan *good governance* di lingkungan BUMDESA, yang antara lain bercirikan transparansi dan akuntabilitas (Mardiasmo, 2004; IAI, 2016 dan 2018)

Berbagai kajian tentang penerapan akuntansi pada BUMDESA antara lain menunjukkan pentingnya penerapan SAK ETAP bagi BUMDESA (Adilah dan Rani, 2020; Saputra, 2021 dan 2022; Suriyanto dkk, 2022), serta pendampingan dalam bentuk pelatihan

akuntansi agar BUMDesa nantinya dapat menyusun laporan keuangan (Onasis dkk, 2017; Wardi dkk, 2017; Ayu dkk, 2020; Sugiyanto, 2020; Amin dan Astuti, 2021; Mahmud dkk, 2021; Syam dkk, 2021; Aliah dkk, 2022; Alamsyahbana dkk, 2022; Trisulo dkk, 2022). Meskipun kajian saat ini memang mengulas tentang pengmas yang memadukan kedua tema di atas, namun pengmas saat ini lebih berfokus pada pengenalan aplikasi akuntansi keuangan yang sederhana bagi BUMDESA. Pengmas dengan tema ini penting karena BUMDESA sering mengeluhkan kendala pada aplikasi akuntansi yang telah diterapkannya selama ini, yaitu sulit dipahami mekanisme penerapannya (terutama jika terdapat transaksi baru yang belum pernah dialami), serta sulit mengatasi masalah yang tiba-tiba muncul saat penerapan aplikasi sehingga mengganggu proses pencatatan transaksi keuangan. Hal ini antara lain pernah disampaikan oleh beberapa BUMDESA saat diskusi Sarapan SDGs Desa 325 (April 2022) kepada narasumber (tim pengmas PKN STAN) sehingga BUMDESA mengharapkan adanya aplikasi akuntansi yang lebih sederhana bagi mereka. Kondisi ini didukung pula oleh kenyataan bahwa kebanyakan personel (SDM) BUMDESA ternyata belum mengenal ilmu akuntansi secara memadai, dan beranggapan bahwa akuntansi itu sulit dipahami dan diterapkan.

PEMBAHASAN

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil kegiatan adalah sebagai berikut.

1. Sosialisasi dan Pelatihan Akuntansi BUMDESA (Mei 2022, di Pemkab Mojokerto).

Kegiatan yang diikuti 13 perwakilan BUMDESA ini berisi pemaparan singkat tentang konsep dasar akuntansi &

simulasi singkat tentang penerapan aplikasi akuntansi keuangan BUMDESA guna penyusunan laporan keuangan sesuai SAK ETAP). Selain itu, pada kegiatan ini dilakukan diskusi (tanya jawab) terkait pengalaman BUMDESA saat mencatat dan melaporkan transaksi keuangan hingga saat ini.

2. Visitasi ke BUMDESA Tanjung Asri, Ds. Tanjungan, Kec. Kemlagi, Kab.Mojokerto (Mei 2022).

Kegiatan ini dilakukan guna mengetahui prak-tek akuntansi BUMDESA (sebagai sampel). Selain penyampaian kembali secara singkat materi sosialisasi & pelatihan akuntansi BUMDESA, juga diperoleh informasi bahwa secara umum laporan keuangan yang dibuat BUMDESA baru sebatas buku kas, yang mencatat arus masuk dan keluar kas (*single entry*), dan tidak dilakukan proses akuntansi (pencatatan jurnal transaksi keuangan hingga penyusunan laporan keuangan). Hal ini karena keterbatasan kompetensi personel BUMDESA dalam ilmu akuntansi. Kepada para personel BUMDESA juga diingatkan agar mengelola arsip kegiatan dan keuangannya sebaik mungkin, karena arsip ini akan menjadi dasar utama pencatatan transaksi keuangan & penyusunan laporan keuangan BUMDESA.

Pada akhir visitasi dilakukan peninjauan unit usaha wisata air yang dikelola BUMDESA Tanjung Asri, sebagai bahan kajian atas gambaran transaksi keuangan BUMDESA.

3. Pendampingan dan konsultasi (diskusi) via zoom antara tim dosen PKN STAN dengan BUMDESA (Juni – Agustus

2022), yang bersifat gabungan maupun individual.

- a. Diskusi gabungan (diikuti oleh beberapa BUMDESA) dilakukan jika tema diskusi bersi-fat umum, misalnya terkait dengan kenda-la proses akuntansi selama ini maupun ken-dala dalam penerapan aplikasi akuntansi yang diperkenalkan saat sosialisasi.
- b. Diskusi individual (diikuti oleh BUMDESA tertentu), ditunjang dengan telepon / WA secara langsung kepada BUMDESA yang bersangkutan, dilakukan jika tema diskusi bersifat khusus, misalnya terkait dengan pembahasan jenis usaha, proses akuntansi, dan penerapan aplikasi akuntansi pada BUMDESA yang bersangkutan (meng-ingat kemungkinan kerahasiaan data BUMDESA, yang wajib dihormati).

Kegiatan diskusi ini sekaligus menjadi sarana bagi tim dosen untuk melakukan evaluasi atas aktivitas pengmas yang telah dilakukan (khususnya terkait materi maupun aplikasi akuntansi).

4. Mengingat keterbatasan waktu diskusi (rata-rata hanya selama 2 jam) maka tim pengmas terlebih dahulu menyampaikan kuesioner pada BUMDESA sebelum diskusi dilakukan. Hasil kuesioner dianggap penting bagi tim dosen sebagai sarana pemetaan (*mapping*) materi kegiatan pendampingan dan diskusi (konsultasi). Hasil kuesioner (dari 10 BUMDESA) mampu memberi informasi bagi tim pengmas tentang gambaran singkat kondisi pengelolaan keuangan dan penerapan akuntansi pada

BUMDESA, antara lain sebagai berikut.

- a. mayoritas BUMDESA memiliki lebih dari 1 jenis usaha;
- b. omzet BUMDESA per tahun hingga Rp 10 juta (pada BUMDESA berkategori pemula/rintisan), lebih dari Rp 10 juta hingga Rp 1 milyar (pada BUMDESA berkategori berkembang/ menengah dan lanjutan/maju);
- c. hanya sebagian BUMDESA yang telah memiliki petugas keuangan khusus, dan petugas keuangan itu pun tidak ditugaskan secara khusus untuk menangani keuangan BUMDESA, melainkan merangkap dengan tugas lain;
- d. Mayoritas petugas keuangan BUMDESA tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi/keuangan, namun mereka berusaha belajar melalui kursus (pelatihan) maupun belajar mandiri melalui *youtube*;
- e. guna pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan, telah tersedia komputer (PC/laptop) BUMDESA, & mayoritas petugas keuangan BUMDESA menerapkan Ms Excel saat bertugas;
- f. mayoritas BUMDESA belum menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai SAK, minimal SAK ETAP, karena umumnya laporan arus kas saja (tapi tidak sesuai SAK) atau laporan operasional (laporan laba rugi) saja;
- g. mayoritas BUMDESA telah mengarsipkan bukti transaksi keuangan, meski tidak se-cara khusus pada media penyimpanan tertentu (seperti ordner), tidak urut tanggal transaksi, dan tidak terpisah menurut jenis transaksi;
- h. pembukuan / laporan keuangan

BUMDESA umumnya diperiksa secara periodik hanya pada akhir tahun.

Penyebab masalah BUMDESA dan usulan solusinya

Hasil sosialisasi, pelatihan, visitasi, pendampingan, dan konsultasi (diskusi via zoom maupun telepon/ *whatsapp*) menunjukkan bahwa sebagian personel BUMDESA memiliki keterbatasan kompetensi ilmu akuntansi. Kondisi ini memunculkan masalah antara lain sebagai berikut.

1. Keterbatasan laporan keuangan yang disajikan BUMDESA, karena selama ini hanya terbentuk buku kas yang berisi laporan arus kas masuk dan arus kas keluar hasil pencatatan transaksi secara *single entry*. Laporan ini tidak bisa dianggap sebagai laporan arus kas sesuai SAK ETAP karena perbedaan format laporan, serta tidak adanya klasifikasi pada arus kas dari kegiatan operasi, investasi, maupun pembiayaan.
2. Kebingungan, ketidaktelitian, dan kesalahan personel BUMDESA dalam mencatat transaksi keuangan secara manual (melalui aplikasi Ms excel) maupun aplikasi akuntansi keuangan BUMDESA yang disimulasikan saat pelatihan. Kondisi ini umumnya terjadi dalam hal:
 - a. penerapan COA (*Course of Action*) / BAS (Bagan Akun Standar);
 - b. penetapan akun yang harus di-Debet (D) dan di-Kredit (K); dan
 - c. penetapan nilai yang harus dicatat pada setiap akun;sehingga sering terjadi kondisi:
 - a. ketidakseimbangan (*unbalanced*) antara jumlah nilai akun yang di-Debet (D) dan akun yang di-Kredit (K);

- b. kemunculan saldo akun D dan K yang tidak normal;
- c. meski terjadi keseimbangan (*balanced*) jumlah nilai akun yang di-Debet (D) dan akun yang di-Kredit (K), namun sebenarnya ada kesalahan penetapan akun dan nilainya. Hal ini sesuai dengan "*warning*" dalam penerapan akuntansi, yaitu bahwa "kondisi *balance* dalam jumlah nilai akun yang di-Debet (D) dan akun yang di-Kredit (K) belum tentu menunjukkan kebenaran dalam pencatatan transaksi keuangan, namun jika muncul kondisi tidak *balance* dalam jumlah nilai akun yang di-Debet (D) dan akun yang di-Kredit (K) maka pasti ada kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan".

Selain itu, saat diskusi secara *daring*, ternyata tidak semua BUMDESA bisa hadir maupun aktif berdiskusi karena kendala jaringan internet.

Solusi yang diusulkan tim pengmas adalah sebagai berikut.

- a. penyusunan ulang draft COA/BAS yang nantinya dapat dikembangkan selaras dengan kebutuhan dan potensi kebutuhan BUMDESA;
- b. pemberian contoh jurnal transaksi keuangan BUMDESA sesuai draft COA/BAS (secara manual maupun aplikasi akuntansi keuangan BUMDESA hasil pelatihan), termasuk rekonstruksi (penyusunan ulang) jurnal transaksi keuangan yang telah dibuat BUMDESA;
- c. penyusunan draft laporan keuangan BUMDESA berdasar data transaksi keuangan BUMDESA, yang mencakup Laporan Laba Rugi (*Income Statement*), Laporan Perubahan Ekuitas (*State-*

ment of Owner's Equity), Neraca atau Laporan Posisi Keuangan (*Statement of Financial Position*) dan Laporan Arus Kas (*Statement of Cash Flows*) berdasarkan SAK ETAP;

- d. pemberian catatan konsep singkat tentang akuntansi guna membantu personel BUMDESA saat menerapkan proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Meskipun berjalan dalam tempo singkat, kegiatan pengmas ini telah bisa menunjukkan masalah utama BUMDESA, yaitu kurangnya kompetensi personel BUMDESA dalam ilmu akuntansi keuangan, sehingga terkendala dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan BUMDESA. Kendala ini telah dicoba diatasi melalui sosialisasi, pelatihan (materi akuntansi BUMDESA sekaligus pengenalan alat bantu berupa aplikasi akuntansi keuangan BUMDESA), visitasi, pendampingan, dan konsultasi (diskusi), dengan memberikan beberapa contoh perbaikan (penyempurnaan) atas mekanisme penerapan akuntansi dalam rangka pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan BUMDESA. Contoh usulan perbaikan ini diharapkan menjadi panduan singkat dan pembanding saat melakukan pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan BUMDESA, agar pada akhirnya BUMDESA menjadi lebih terbiasa dan mandiri dalam menjalankan aktivitas di atas.

Namun demikian, karena ilmu akuntansi tidak mungkin dipelajari dan dipahami dalam waktu singkat, apalagi terdapat kemungkinan makin kompleks dan komprehensifnya jenis usaha dan model transaksi keuangan yang dihadapi, maka perlu ada pendampingan lebih lanjut atas BUMDESA, yang antara lain bisa lebih menekankan tentang penting-

nya kompetensi akuntansi bagi personel BUMDESA, pengarsipan bukti transaksi sebaik dan sesistimatis mungkin, serta pemeriksaan internal pembukuan / laporan keuangan secara periodik dalam jangka yang lebih pendek (interim) seperti bulanan, triwulanan, dan semesteran, tidak hanya tahunan.

Evaluasi atas kemajuan dan manfaat kegiatan yang telah dilakukan selama ini, juga perlu dilakukan. Hal ini penting agar dapat diperoleh gambaran lebih komprehensif tentang proses apa saja yang perlu ditambahkan, atau sebaliknya dikurangi / dihindari, agar personel BUMDESA makin kompeten dalam menjalankan proses akuntansi BUMDESA. Selain itu, melalui evaluasi diharapkan tersedia umpan balik (*feedback*) guna perbaikan, penyempurnaan, dan pengembangan sistem aplikasi akuntansi keuangan bagi BUMDESA, misalnya aplikasi berbasis android (sebagaimana yang diharapkan BUMDESA), ditunjang dengan pengmas lanjutan maupun riset di bidang pengelolaan keuangan maupun aset BUMDESA.

Melalui proses akuntansi oleh personel BUMDESA yang kompeten, ditunjang dengan keberadaan aplikasi akuntansi yang memadai, diharapkan tercipta peningkatan *good governance* (antara lain bercirikan transparansi dan akuntabilitas) dalam pengelolaan BUMDESA (meningkatkan kualitas manajemen keuangan maupun laporan keuangan BUMDESA) (Mardiasmo, 2004). Dengan demikian, informasi pada laporan keuangan BUMDESA dapat digunakan BUMDESA dalam mengambil keputusan ekonomis demi kelangsungan hidup dan perkembangan usaha BUMDESA.

REFERENCES

- Adilah, Hasna dan Rani, Utpala., 2020, Kajian teoritis pelaporan keuangan pada BUMDES ditinjau dari SAK ETAP. *Gorontalo Accounting Journal*, 3 (2), 116-127.
- Alamsyahbana, Muhammad Isa dkk., 2022, Pelatihan peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan BUMDes di Kabupaten Bintan. *Dikmas-Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*, 2 (2), 345-356.
- Aliah, Nur dkk., 2022, Penyusunan Laporan Keuangan yang Baik dan Benar pada BUMDes. *Owner-Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6 (3), 2457- 2462.
- Amin, Asbi dan Astuti, Niken Probondani., 2021, Akuntansi BUMDes di Desa Je'nemadinging, Kabupaten Gowa. *Jurnal Komunitas – Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3 (2), 137-142
- Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sri. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan, Studi pada BUMDES di Gunungkidul, Yogyakarta-ta. *Modus*, 28 (2), 155-167.
- Ayu Maristiana dkk., 2020, Tata kelola dan Admi-nistrasi BUMDES. *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 1 (1), 1-10.
- Mahmud, Amir dkk, 2021, Peningkatan Kapabilitas Pengurus BUMDes Asung Daya melalui Pema-haman Akuntansi. *E-Dimas – Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 12 (4), 685-691.
- Onasis, Dini dkk., 2017, Pelatihan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang Berbasis Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) di Desa Murai jalai, Kecamatan kampar Utara, Kabupaten Kampar. *Dinamisia – Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1 (1), 15-22.
- Saputra, Dian., 2021, Analisis Penerapan Akuntansi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) X, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu. *Valuta*, 7 (2), 92-109.
- Saputra, Dian., 2022, Analisis Penerapan Akuntansi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Kuantan Singingi. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6 (1), 13-21.
- Sugiyanto, Hari., 2020, Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes Tirta Wening Makmur, Desa Gondosuli, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. *Intervensi Komunitas – Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1 (2), 132-140.
- Suriyanto dkk., 2022, Implementasi Standar Akuntansi keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ujung Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Khusus Perempuan). *Jurnal Mirai Management*, 7 (2), 163-174.
- Syam, Akhmad Yafis dkk., 2021, Penyuluhan dan Bimtek Kebijakan Akuntansi BUMDes Maju Jaya Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung, Kabupaten Tala. *Jurnal Pengabdian Aceh*, 1 (2), 79-83.
- Trisulo dkk., 2022, Edukasi Penyusunan Laporan keuangan BUMDes Sumber kamulyan Desa Wunut, Kabupaten Klaten. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 1 (3) 145-155.
- Wardi, Jeni dkk., 2017, IBM UKMK di bidang Akuntansi dan Keuangan Desa di Kecamatan Bunut, Kecamatan Pelalawan, Provinsi Riau, Indonesia. *Dinamisia – Jurnal Pengabdian Kepada Masya-rakat*, 1 (1), 29-34.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2016, Standar Akun-tansi Keuangan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2018, Standar Akun-tansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Mene-ngah (SAK EMKM).
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2020, Standar Akun-tansi Keuangan, 2020.
- Mardiasmo, 2004, Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta-ta: Andi.

Weygandt, Jerry J., Kimmel, Paul D., and Kieso, Donald E. (2018). *Financial Accounting, IFRS Edition, Third Edition*. USA: Wiley.

Binawati, Endah, 2022, Materi Rakor Pendampingan BUMDESA Pemprov Jawa Timur dengan PKN STAN.

PKN STAN, 2022, Kerangka Acuan Kerja (KAK) Peng-mas Peningkatan Kapasitas SDM BUMDESA Pro-vinsi Jawa Timur.

Materi diskusi Sarapan SDGs Desa sesi 325 dengan topik Penilaian Aset BUMDESA (21 April 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP 11/2021).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Permendagri 1/2016).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelola-an, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (PermendesaPDTT 4/2015).